

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Gerakan masyarakat sangat dibutuhkan untuk terciptanya Pemerintahan yang baik dalam sebuah pemerintahan, dengan gerakan yang dihadirkan dari masyarakat maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan dapat melaksanakan kepemimpinan dalam pemerintahan. Dengan adanya penyebaran Virus Covid-19 masyarakat terdampak pandemi covid 19 dituntut memiliki daya kreatifitas tinggi dalam memecahkan persoalan pandemi Covid-19. Penyebaran Virus Covid-19 menjadi salah satu persoalan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, terjadinya penyebaran pandemi covid-19 menyebabkan berbagai perubahan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Pembatasan aktifitas serta kegiatan masyarakat ditengah pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai kerugian yang berdampak terhadap masyarakat.(Hadiwardoyo et al., n.d.2020). Persoalan yang terjadi ditengah penyebaran Covid 19 berdampak pada sektor pertanian, pariwisata, sektor perdagangan serta sektor yang paling berdampak terhadap masyarakat adalah sektor domestik ( rumah tangga ) dan memiliki dampak bagi masyarakat yang bekerja dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah, masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta. Kerugian dalam perekonomian yang disebabkan dibatasinya aktifitas ditengah pandemi membuat pemerintah harus memunculkan solusi dalam menyelesaikan berbagaimacam persoalan yang terjadi. (Yamali & Putri, 2020).

Penyebaran Pandemi Covid 19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat Indonesia mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan. Hal ini

terjadi karena diberlakukannya pembatasan aktifitas masyarakat yang disebabkan munculnya wabah pandemi Covid – 19(Nasution et al., 2020). Sektor usaha masyarakat menjadi sasaran terjangkitnya wabah Covid 19 ditengah – tengah masyarakat, banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencarian memunculkan masalah kemiskinan ditengah – tengah aktifitas yang dilakukan oleh setiap masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

Kemiskinan menjadi salah satu masalah global dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadi tantangan tersendiri didalam sebuah negara berkembang seperti Indonesia(Azmi et al., 2021). Persoalan kemiskinan menjadi sebuah tantangan dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh negara Indonesia, dilihat dari Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia memiliki tujuan untuk membentuk pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terbebasnya rakyat Indonesia dari persoalan kemiskinan dengan melindungi seluruh warga negara demi terciptanya masyarakat yang adil serta makmur dalam menjalani kegiatan sehari – hari adalah salah satu cita – cita bangsa Indonesia.

Penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan merealisasikan peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa salah satu strategi untuk membebaskan masyarakat dari bencana dapat dilaksanakan melalui upaya pengembangan desa dan kelurahan tangguh terhadap bencana dengan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK

). Selain itu, penanggulangan kemiskinan juga termaktub dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat miskin di Indonesia. Sampai saat ini, keterlibatan aparatur pemerintah dianggap penting dalam menanggulangi kemiskinan di suatu wilayah serta dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 dikatakan bahwa kelurahan atau desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah, langsung dibawah camat dan memiliki hak untuk menyelenggarakan rumahtangganya sendiri dalam ikatan negara Republik Indonesia, Maka dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, Lurah merupakan penyelenggara yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan kemasyarakatan dan dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Berdasarkan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2005 pada pasal 4 ayat satu dijelaskan bahwa Pemerintah Kelurahan memiliki tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Serta pada Peraturan Presiden nomor 73 tahun 2005 dijelaskan bahwa Kelurahan merupakan bagian dari perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan serta terdapatnya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dibentuk melalui permusyawaratan oleh masyarakat dan pihak kelurahan untuk membantu mencapai tujuan pemerintah kelurahan. Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan merupakan suatu organisasi yang memiliki tugas dan fungsi memberdayakan masyarakat kelurahan melalui RT/RW yang terdapat disebuah kelurahan. Pentingnya peran Kelurahan dalam memimpin

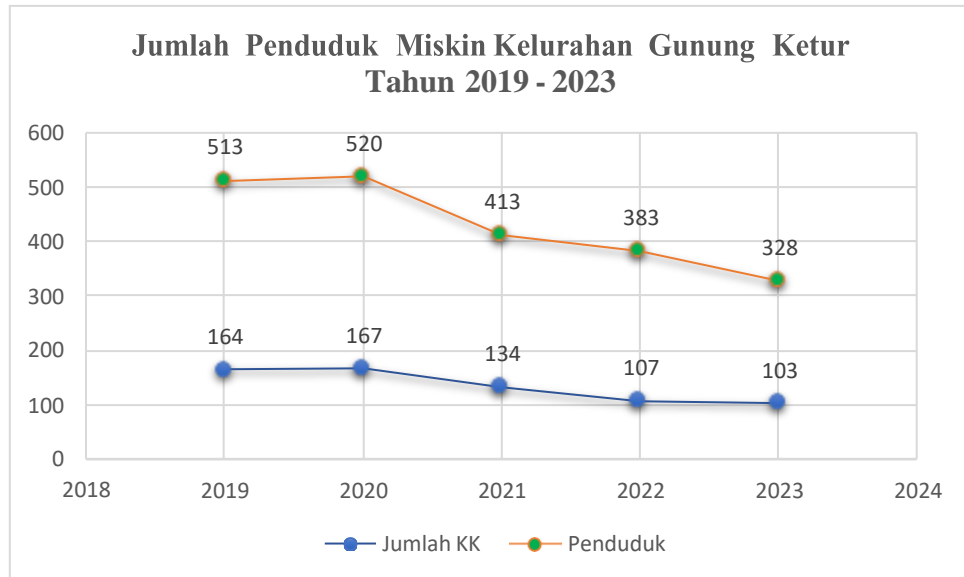
masyarakat adalah sebagai salah satu bagian dari perangkat daerah yang memiliki fungsi memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, Pemerintahan Kelurahan hadir tidak hanya untuk melayani dirinya sendiri melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi yang nyaman untuk setiap anggota masyarakatnya. Hal ini di upayakan guna terciptanya Pemerintahan yang baik dengan menuntut keterlibatan setiap elemen yang terdapat dalam masyarakat Kelurahan untuk terlaksananya pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Kelurahan memiliki fungsi pelaksanaan dan pembinaan terhadap masyarakat.

Setiap Kelurahan memiliki kewenangan sendiri dalam pengembangan potensi Kelurahan guna mengurangi kemiskinan masyarakat, dengan tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi berbagai kemiskinan yang terjadi pada masyarakat, dilaksanakan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan potensi kelurahan melalui ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada serta sarana dan prasarana yang terdapat di sebuah kelurahan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban di suatu wilayah Kelurahan(Wahyuddin et al., 2019).

Penyebaran Covid 19 secara jelas sangat mempengaruhi kemiskinan masyarakat suatu kelurahan, harapan dari masyarakat Kelurahan dengan terjadinya penyebaran virus covid 19 menjadikan pemerintahan setingkat Kelurahan hanya berpatok pada bantuan Pemerintah yang menyebabkan pembangunan Kelurahan dan perkembangan ekonomi yang terdapat di sebuah Kelurahan mengalami pengkebirian terhadap perekonomian masyarakat. Masyarakat kelurahan dengan adanya pandemi covid 19 hanya mengharapkan bantuan langsung dari

pemerintahan yang menimbulkan masyarakat tidak lagi inovatif dan kreatif dengan adanya fenomena pandemi Covid 19. Hal ini terjadi akibat banyaknya masyarakat disebuah kelurahan yang kehilangan pekerjaan dengan adanya pandemi covid-19 (Abdul Muaz at al.,2020). Kemiskinan masyarakat yang disebabkan oleh pandemi covid-19 mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat kelurahan, mulai dari persoalan perekonomian masyarakat karena pentingnya menjamin perekonomian masyarakat dapat memberikan kesempatan bagi setiap warga untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa kebutuhan untuk makan, minuman dan berpakaian serta memenuhi keberadaan tempat tinggal.

Untuk menjamin kebutuhan masyarakat dan guna mencapai pembangunan berkelanjutan tentu peran pemerintahan tingkat kelurahan sangat diperlukan dalam menangani kemiskinan yang terjadi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan maka peran Pemerintahan Kelurahan sangat diperlukan dalam mengangkat dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat kelurahan. Dengan kemampuan mengembangkan potensi yang terdapat dalam suatu kelurahan merupakan salah satu hal yang dilakukan dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Dalam hal ini guna meningkatkan perekonomian masyarakat kelurahan dan mengurangi kemiskinan akibat pandemi covid 19, Pemerintahan Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk 4.512 orang dengan jumlah KK 1.628 merupakan salah satu kelurahan yang terdampak pandemi Covid -19 didasarkan dengan banyaknya masyarakat Kelurahan Gunungketur yang kehilangan pekerjaan akibat dari Covid – 19.



Grafik 1. 1 Grafik Jumlah Penduduk Miskin Kelurahan Gunungketur Tahun 2019 – 2023

Sumber : Data Kelurahan Gunungketur Tahun 2019-2023

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kelurahan Gunungketur pada tahun 2019 -2020 mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah kemiskinan yang terjadi pada tahun 2019 – 2020 disebabkan oleh terjadinya penyebaran Virus Covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat kelurahan Gunungketur yang kehilangan mata pencarian. Adanya penyebaran pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi masyarakat kelurahan Gunungketur menurun, tidak terlepas dari ketidaksiapan masyarakat menghadapi pandemi yang datang secara tiba – tiba. Penyebaran Covid-19 mulai dari tahun 2019 memicu menurunnya tingkat pendapatan masyarakat yang berdampak pada kenaikan angka kemiskinan di Kelurahan Gunungketur. Sedangkan pada tahun 2020 – 2023 angka kemiskinan di Kelurahan Gunungketur cenderung menurun. Dilihat dari tahun 2020 angka kemiskinan di Kelurahan Gunungketur mengalami penurunan setiap tahunnya dengan jumlah kartu keluarga miskin di Kelurahan

Gunungketur pada tahun 2020 sejumlah 167 kartu keluarga miskin dan tahun 2021 sejumlah 134 kartu keluarga miskin ( 413 Warga miskin ) serta di tahun 2022 mengalami penurunan berturut – turut yaitu tahun 2022 sejumlah 107 kartu keluarga miskin ( 383 warga ) dan di tahun 2023 berjumlah 103 kartu keluarga miskin dengan jumlah 328 warga. Terjadinya penurunan angka kemiskinan mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tidak terlepas dari peran pemerintah Kelurahan Gunungketur yang memberikan pelayanan terhadap pencegahan tingkat kemiskinan dengan menjanging kerjasama terhadap lembaga pengembangan masyarakat di Kelurahan Gunungketur bersama RT,RW dan lembaga masyarakat yang dibentuk dengan SK Kelurahan.



Grafik 1. 2 Grafik Penduduk Miskin Kelurahan Gunungketur Tahun 2019 – 2023

Sumber : Data Kelurahan Gunungketur Tahun 2019-2023

Dari data diatas menunjukkan bahwa menurunnya angka kemiskinan masyarakat di Kelurahan Gunungketur tercipta dari peran masyarakat yang percaya terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah di Kelurahan Gunungketur serta peran keterlibatan langsung dari masyarakat, seperti Keterlibatan Warung Omah Kreatif

Loedji sebagai komunitas yang dibentuk oleh masyarakat di Kelurahan Gunungketur yang memiliki fokus pada upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Kelurahan Gunungketur. Pemerintahan Kelurahan Gunungketur melalui visi Pemerintah Kelurahan, yakni Terwujudnya Derajat Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berbudaya Melalui “GUNTUR BERDAYA” ( Bersama-Mandiri dan Berbudaya ) melakukan upaya bersinergi membangun Kelurahan bersama masyarakat dengan memberikan kepercayaan terlebih dahulu kepada masyarakat dengan visi yang diciptakan oleh Pemerintah Kelurahan. Serta setelah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sinergitas dan kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Gunungketur dilaksanakan melalui visi Pemberdayaan perempuan dan warga rentan miskin untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan Kelurahan, Join Monitoring Berupa CSR( Corporate Social Responcibility).

Didasarkan terhadap Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas yang menyatakan bahwa tanggung jawab dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan guna meningkatkan kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri serta komunitas yang ada dalam suatu masyarakat. Selain itu pemerintahan Kelurahan Gunungketur juga mengupayakan penciptaan sarana dan prasarana sehat yang ramah lingkungan, hunian difabel serta anak dan lansia. Peran kelurahan dalam menangani kemiskinan dilaksanakan dan program yang dikembangkan melalui desa, memberikan ruang secara leluasa kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomiannya.(Kusuma & Hariyani, 2022).



Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memperkuat Gerakan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Gunungketur Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta. Peran masyarakat Kelurahan Gunungketur dalam menanggulangi kemiskinan melalui gerakan Warung Omah Kreatif Loedji ( WARSIMAH ) yang dibentuk atas dasar kesadaran masyarakat di Kelurahan Gunungketur menjadi hal yang menarik untuk dilaksanakan penelitian ini. Kehadiran Warung Omah Kreatif Loedji ( WARSIMAH ) didasarkan atas kesadaran masyarakat terhadap persoalan kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Gunungketur setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebar di masyarakat mulai dari tahun 2019. Terjadinya trendkenaikan angka kemiskinan di Kelurahan Gunungketur pada tahun 2019 dengan jumlah kemiskinan kartu keluarga di masyarakat Gunungketur berjumlah 164 Kartu Keluarga miskin dengan kisaran angka kemiskinan di tahun 2019 mencapai 513 orang dan terjadinya tren kenaikan pada tahun 2020, angka kemiskinan di Kelurahan Gunungketur Mencapai 167 kartu keluarga miskin dengan kisaran angka 520 orang penduduk miskin di Kelurahan Gunung Ketur, Sehingga munculnya kesadaran masyarakat Gunungketur untuk membentuk gerakan Warung Omah Kreatif Loedji ( WARIMAH ) yang terfokus pada penanggulangan angka kemiskinan masyarakat di Kelurahan Gunung Ketur Kota Yogyakarta.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memperkuat Gerakan “WARSIMAH” Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Gunungketur Kota Yogyakarta ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini mengacu kepada rumusan masalah yang peneliti rumuskan yaitu, untuk mengetahui Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memperkuat Gerakan “WARSIMAH” Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Gunungketur Kota Yogyakarta.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian diberbagai kalangan meliputi :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembaca dalam memahami informasi terkait Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memperkuat Gerakan “WARSIMAH” Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Gunung Ketur Kota Yogyakarta.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Pemerintah : Kontribusi bagi Pemerintah Kelurahan Gunungketur dalam memberikan pelayanan publik dalam hal pengembangan ekonomi kreatif masyarakat dalam mengurangi kemiskinan serta bisa digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah kelurahan supaya menciptakan program yang lebih maksimal.
2. Bagi Masyarakat : Memberikan referensi terkait suatu sistem transformasi Pemerintah Kelurahan dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan.
3. Bagi Peneliti : Menjadi referensi bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang terkait kualitas kelembagaan untuk pengembangan dan perbaikan Pemerintah Kelurahan.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan ringkasan penelitian terdahulu yang dapat memberikan gambaran dalam sebuah penelitian yang akan dilaksanakan oleh seorang peneliti. Menurut Jhon W Cresswel dalam (Ritonga & Muhandhis, n.d. 2020) tinjauan pustaka adalah sebuah ringkasan mengenai penelitian terdahulu baik dari sumber artikel jurnal, buku dan dokumen yang dapat membantu sebuah penelitian yang akan dilaksanakan oleh seorang peneliti yang mendeskripsikan tentang teori serta berbagai macam informasi penelitian terdahulu maupun penelitian sekarang. Oleh karena itu peninjauan yang dilaksanakan oleh peneliti sangat penting karena dapat digunakan sebagai landasan untuk mengetahui seberapa relevan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dan penelitian yang akan datang. Berikut merupakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang peran pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka**

No	Nama Penulis, Tahun, Jurnal Dan Link	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Nardin, 2019), <i>Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik</i> , Vol 8,No3 (2019) <a href="https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1799/1295">https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1799/1295</a>	Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program BUMDES	Sebagai penyelenggara otonomi desa yang memiliki tujuan menetapkan arah kebijakan pembangunan desa guna meningkatkan pembangunan sebuah desa, berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa dijadikan sebagai landasan untuk meningkatkan potensi desa melalui badan usaha milik desa dengan pengembangan

			kemampuan masyarakat desa.
2.	(Iriawan & Edyanto, 2022), <i>Jurnal Sosio e-Kons</i> , <i>Vol 14 No 2 ( 2022 )</i> <a href="https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/view/12954">https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/view/12954</a>	Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Noken di Kelurahan Fandoi	Pemberdayaan dalam masyarakat membutuhkan peran keterlibatan pemerintahan desa dalam menjembatani kebutuhan masarakat untuk meningkatkan potensi masarakat, keterlibatan pemerintah yang masih kurang mulai dari kegiatan sosialisasi sampai dengan pemberian bantuan pendanaan menjadi kendala dalam pemberdayaan masyarakat pengrajin Noken di kelurahan Fandoi.
3.	(Hartanti & Hendratmoko, n.d.,2019) <i>Jurnal Mentari Publika</i> , Vol, 3 No 1 ( 2022 ) <a href="https://ejournal.itskesmbuslonq.ac.id/index.php/imp/article/view/62">https://ejournal.itskesmbuslonq.ac.id/index.php/imp/article/view/62</a>	Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pengelolaan Bahan Makanan	Lurah memiliki peran memberikan kebijakan melalui pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan pelaku industri rumah tangga, dalam meningkatkan ekonomi masarakat serta mengurangi dampak kemiskinan melalui keterlibatan pelaku rumah tangga sebagai para pelaku usaha memberikan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat kelurahan.
4.	(Idris et al., 2019) <i>Jurnal Respon Republik</i> Vol 13, No 4 ( 2019 ) <a href="https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3587/3645">https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3587/3645</a>	Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Kampung Jodipan Dan Kampung Tridi	Peran pembangunan pemerintahan dalam pengembangan masyarakat membutuhkan peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur serta bantuan pendanaan dari pemerintah dan kurangnya tingkat sumberdaya manusia

			yang dimiliki menjadi kendala dalam meningkatkan ide – ide yang terdapat dalam masyarakat.
5.	(Siwiyanti et al., 2021) <i>Jurnal Masyarakat Mandiri</i> Vol 5, No 3 ( 2021 ) <a href="https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/4990">https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/4990</a>	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Peran pemerintahan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan pemberdayaan lembaga masyarakat melalui pemerintahan, pelaksanaan FGD terhadap masyarakat serta memberikan pelatihan kepemimpinan bagi karang taruna dan peningkatan kapasitas yang Lembaga pengembangan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui peran dalam peningkatan pembangunan sebuah desa.
6.	(Sitaman Said & Azhar, 2021.) <i>Jurnal Pendidikan dan Kajian Ekonomi</i> Vol 4, No 1 ( 2021 ) <a href="https://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/article/view/439">https://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/article/view/439</a>	Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ( UMKM ) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima	Usaha Mikro Kecil Dan Menengah memberikan peluang kerja bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan dapat menjadi pelaku usaha bagi masyarakat yang bekerja disektor Industri Kecil Menengah ( UMKM )
7.	(Nartin & Musin, 2022) <i>Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan</i> Vol 1, No 3 ( 2022 ) <a href="https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/23">https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/23</a>	Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19	Peran pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masarakat tidak berjalan secara semestinya, hal ini karena pemberian bantuan terhadap

			masyarakat yang terdampak pandemi tidak disamaratakan serta pemerintah tidak maksimal dalam memberikan peraturan dalam penanggulangan pandemi terhadap masyarakat setempat.
8.	(Zulkarnain, 2018) Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 11, No 2 ( 2018 ) <a href="http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8055">http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8055</a>	Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Tamaona Kabupaten Gowa	Peran pemerintah kelurahan hadir sebagai solusi dan memberikan ruang keterlibatan terhadap masyarakat secara partisipatif dengan memberikan bantuan modal usaha serta menanamkan nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi membangun kelurahan.
9.	(Ondang et al., n.d.2019) Jurnal Eksekutif Vol 3, No 3 ( 2019 ) <a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jumaleksekutif/article/view/25488">https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jumaleksekutif/article/view/25488</a>	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) di Kabupaten Minahasa	Peran pemerintah dalam memberikan iklim yang baik terhadap pengembangan UMKM milik masyarakat serta meningkatkan strategi kebijakan publik yang perlu berpihak terhadap masyarakat, Persoalan UMKM yang tidak berjalan baik dikarenakan pengelolaan yang kurang profesional dari para pelaku UMKM dan kurangnya keterlibatan pemerintah.
10.	(Dimut, n.d.,2019) <i>Jurnal Adminitrasi Publik</i> Vol 1, No 2 ( 2017 ) <a href="http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/JAP/article/view/3220">http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/JAP/article/view/3220</a>	Peranan Lurah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam	Peran lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kewilayahan di kelurahan Situbatu

		Pembangunan di Wilayah Kelurahan Situbau Kecamatan Banjar Kota Banjar	memiliki penilaian yang baik, karena lurah memberikan peran dukungan serta pendampingan dalam pemberdayaan terhadap masyarakat.
--	--	---	---

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, tahun 2018 - 2023

Penelitian sebelumnya terfokus pada peranan Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap potensi yang terdapat di Kelurahan. Sedangkan pada penelitian ini akan mengkaji Peran pemerintah Kelurahan Gunungketur dalam memperkuat gerakan Warung Omah Kreatif Loedji ( WARSIMAH ) sebagai salah satu gerakan yang hadir atas dasar kesadaran masyarakat di Kelurahan dalam menghadapi persoalan kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Gunungketur Kota Yogyakarta. Adanya kesadaran masyarakat di Kelurahan Gunungketur dalam menciptakan inovasi dari masyarakat untuk melaksanakan kegiatan berupa Gerakan Warung Omah Kreatif Loedji(WARSIMAH) untuk dapat membantu menangani persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat menjadi kebaruan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, serta dengan adanya perbedaan teori, topik pembahasan dan metode penelitian juga membedakan dengan penelitian sebelumnya.

### **1.6 Kerangka Dasar Teori**

Untuk memahami masalah yang akan diteliti, maka perlu untuk diketahui terlebih dahulu pedoman atau landasan yang berkaitan dengan sebuah teori untuk mengemukakan apa yang dimaksud dengan teori. Menurut KBBI teori adalah sebuah landasan penelitian dan penemuan yang didukung berdasarkan data dan

argumentasi serta didasarkan pada penyelidikan eksperimental yang akan menghasilkan fakta dengan didasarkan pada ilmu yang pasti serta logika dan metode argumentasi yang berlandaskan asas hukum umum menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan dengan aturan dan cara dalam mengerjakan suatu hal. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.6.1. Peran**

Menurut (Prayudi et al., 2019) teori peran pertama kali muncul diperkenalkan oleh para pemikir klasik seperti George Herbert, Ralph Limon dan Jacob Moreno, yang menerjemahkan peran sebagai bentuk reaksi simbolis yang berfokus pada faktor – faktor individual melalui aktifitas interaksi sosial serta sebagai salah satu bentuk kognitif yang merepresentasikan pedoman perilaku diri sendiri dan perilaku diri orang lain. Adapun defenisi peran sebagai berikut :

#### a) Defenisi Peran

Teori peran atau sering disebut *Role Theory* dikembangkan oleh Khan merupakan teori manajemen yang menjelaskan hubungan sebuah individu atau sebuah organisasi yang dapat mempengaruhi harapan seorang individu terhadap peranan tersebut. Dalam aktifitas kegiatan sosial manusia baik yang dilaksanakan secara individu maupun dilaksanakan dengan kelompok selalu terjadi interaksi yang membutuhkan keterlibatan sosial, karena peran merupakan salah satu bentuk perwujudan perkumpulan yang dilaksanakan secara relatif yang dibatasi dengan norma dan diharapkan dari perilaku yang dilaksanakan baik secara individu maupun dilaksanakan secara kelompok orang. Menurut Bauer dan Jeffrey ( dalam



buku *role ambiguity and role clarity* ) peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam sebuah studi perilaku didalam organisasi.

Menurut Ely Chinoy ( dalam Soerjono Soekanto ) menjelaskan pentingnya peran karena mengatur sesuatu perilaku yang dapat menimbulkan sebab seseorang pada batasan – batasan tertentu dan meramalkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang lain sehingga aktifitas yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan komunitas atau organisasi. Menurut (Prayudi et al., 2019) teori peran menekankan kepada sifat secara individual sebagai salah satu bentuk interaksi bagi para pelaku sosial yang mempelajari suatu perilaku sesuai dengan yang ditempatkan dalam komponen kehidupan masyarakat.

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sebuah bentuk reaksi secara simbolis yang muncul baik secara individu maupun kelompok yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap aktifitas yang dilaksanakan melalui fenomena sosial antara individu atau suatu kelompok. Dalam teori peran sendiri terdapat tiga syarat terhadap suatu peran, diantaranya :

- a) Peran harus sesuai dengan norma yang berkaitan terhadap suatu posisi serta tempat seseorang dalam tatanan masyarakat.
- b) Peran berkaitan dengan suatu perilaku yang dapat dikerjakan atau dilaksanakan oleh seorang individu dalam kehidupan masyarakat sebagai sebuah organisasi dalam arti lain sebagai bentuk tindakan yang dihadirkan oleh individu dalam struktur sosial masyarakat.

- c) Peran adalah sebuah rangkaian yang dihasilkan oleh karena suatu jabatan atau profesi yang akan terlihat jika seseorang melaksanakan hak serta kewajibannya terhadap suatu peranan.

b) Jenis – Jenis Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran dibagi menjadi tiga, diantaranya :

1. Peran aktif

Peran aktif adalah peran yang ditunjukkan oleh seorang individu karena hal kewajibannya dari sebuah posisi jabatan atau pekerjaan dalam satuan organisasi.

2. Peran pasif

Peran pasif merupakan peran yang diberikan oleh suatu anggota kelompok kepada kelompoknya dengan memberikan bentuk penahanan diri untuk memberikan peluang kepada orang lain dalam kelompok tersebut untuk memberikan sebuah perannya.

3. Peran partisipasif

Peran partisipasif adalah sebuah bentuk pemberian peran yang dilakukan oleh individu dalam sebuah kelompok untuk memperlihatkan keterlibatan yang diperlukan sebuah organisasi atau kelompok. Dari jenis – jenis peran yang telah disebutkan diatas, peristilahan peran dibagi beberapa golongan, diantaranya :

1. Setiap individu yang mengambil bagian dalam setiap kesempatan untuk melakukan interaksi sosial.

2. Perilaku yang ditunjukkan atau muncul dalam kegiatan interaksi sosial masyarakat.
3. Kedudukan individu atau oranglain dalam sebuah perilaku
4. Kaitan antara seseorang atau individu dalam sebuah tindakan perilaku.

Pemerintahan Kelurahan dalam penguatan lembaga masyarakat memiliki beberapa peran untuk menjalankan kepemimpinan terhadap Masyarakat di Kelurahan. Menurut George Herbert Mead dalam (Prayudi et al., 2019) Peran dapat dilaksanakan sebagai lansasan dasar terciptanya perilaku seseorang ataupun setiap kelompok yang menempati posisi sosial tertentu dalam tatanan kehidupan masyarakat yang akan dikonsespsikan menjadi ekspektasi terhadap cita – cita yang akan dipegang teguh oleh setiap individu dengan individu lain dalam melaksanakan hubungan sosial yang di ekspresikan melalui perilaku serta menjadi sebuah perubahan yang dapat terjadi dalam masyarakat luas.

- a. Peran Sebagai Motivator

Pemerintah kelurahan menjadi pendorong dan memberikan nilai semangat positif kepada masyarakat yang berada di kelurahan. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan pemerintah kelurahan dalam memberikan motivasi terhadap lembaga yang terdapat di masyarakat kelurahan dengan bentuk memberikan motivasi, rasa kepercayaan terhadap pemerintahan yang dijalankan serta untuk tumbuhnya sikap saling kerjasama dengan berbagaimacam lembaga pengembangan masyarakat di sebuah kelurahan, dengan memberikan bantuan dari segi pendanaan guna meningkatkan pembangunan didalam Kelurahan. Pemerintah Kelurahan dalam menjalankan perannya sebagai Motivator terhadap masyarakat senantiasa menerima ide dan gagasan dari masyarakat untuk di wujudkan bersama dalam

menjalankan Pemerintah Kelurahan dan dengan memberikan rasa kepercayaan kepada setiap Individu masyarakat Untuk dapat mengembangkan potensi yang terdapat di setiap Kelurahan.

b. Peran Sebagai Fasilitator

Pemerintah Kelurahan menjadi fasilitator terhadap pelaksanaan pemerintahan masyarakat setempat, hal ini ditunjukkan dengan peran pemerintah kelurahan dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam pelayanan Pemerintahan demi meningkatkan pembangunan dalam masyarakat, pemerintah kelurahan juga menjadi perantara setiap warga masyarakat dikelurahan untuk mengajak tokoh masyarakat, lembaga pengembangan masyarakat dalam merumuskan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dikelurahan setempat, mulai dari pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan serta pemerintah kelurahan juga memiliki kewajiban memberikan anggaran terhadap program – program yang telah diusulkan oleh masyarakat. Selain itu Pemerintah Kelurahan memiliki peran menyusun rencana pembangunan yang meibatkan pemikiran serta saran dan masukan dari masyarakat setempat dengan dilaksanakan secara partisipasif guna menumbuhkan kondisi dinamis dalam rangka terlaksananya pemberdayaan terhadap masyarakat setempat dengan memperhatikan fasilitas kebutuhan masyarakat dan menjadi perantara masyarakat dalam menjalankan Pemerintahan dengan berbagai organisasi Pemerintahan serta Pemerintah Kelurahan memiliki kewajiban dalam melaksanakan penganggaran untuk kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam mengembangkan potensi yang terdapat di Kelurahan.

### c. Peran Mobilisator

Pemerintah Kelurahan memiliki fungsi menjadi mobilisator dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan dengan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan program – program yang muncul dari ide – ide masyarakat setempat, hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan PKK dan Karangtaruna serta kegiatan kelompok sadarwisata dan kegiatan yang hadir dari komunitas masyarakat di Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kelurahan memiliki peran aktif dalam memobilisasi penyediaan kebutuhan masyarakat untuk melaksanakan Pemerintahan di tingkat Kelurahan.

### d. Peran Dalam Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Kelurahan dalam menjalankan pembangunan Pemerintahan ditujukan dengan adanya partisipasi dari masyarakat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan kelurahan, Keterlibatan masyarakat dalam Perencanaan pembangunan Kelurahan merupakan bentuk perwujudan peran Pemerintah Kelurahan dalam memberikan peluang kepada setiap warga masyarakat di Kelurahan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang dapat membantu terlaksananya pembangunan di Kelurahan. Keterlibatan masyarakat dalam menjalankan Berbagai program pembangunan yang terdapat disekitar Pemerintahan Kelurahan dapat dilaksanakan guna pembangunan infrastruktur yang terdapat di Kelurahan serta menjadi bentuk kerjasama yang dapat dihasilkan oleh Pemerintah Kelurahan bersama dengan masyarakat dalam menjalankan kehidupan di Kelurahan.

## 1.6.2 Gerakan Sosial

Menurut David Mayer ( dalam *The Social Movemen Society* 1998 ) Gerakan sosial secara inklusif adalah rintangan bersama yang didasarkan dari tujuan dan solidaritas yang sama dalam keterkaitan berkepanjangan dengan kelompok elit, saingan ataupun musuh serta pemegang otoritas. Gerakan sosial memiliki empat pokok utama antara lain, tantangan dan tujuan bersama, solidaritas dan identitas bersama dalam menjaga politik perlawanan. Anthony Giddens menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan sebuah bentuk upaya yang dilakukan secara kolektif untuk mengejar suatu target pencapaian terhadap suatu kepentingan bersama atau sebuah tindakan yang dilaksanakan secara kolektif (*Collective action*). Menurut Cohen dalam (Haris et al., 2019) gerakan sosial merupakan gerakan yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki sifat terorganisir dalam rangka tujuan untuk mengubah ataupun untuk mempertahankan sesuatu unsur tertentu yang terdapat dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Terdapat 3 bagian penting dalam gerakan sosial yang memiliki dampak terhadap pemberian peran dalam menentukan keberhasilan aksi – aksi sosial, diantaranya :

### 1. Struktur kesempatan politik ( *Political Opportunity Structure* )

Struktur kesempatan politik adalah salah satu bentuk ungkapan ekspresi yang memiliki tujuan dalam melaksanakan aktifitas analisis tentang keadaan suatu fenomena sosial, keadaan politik yang berpengaruh terhadap kemunculan suatu struktur, skope serta keberhasilan gerakan – gerakan sosial yang dilaksanakan.

## 2. Struktur Mobilisasi (*Mobilizing Structur* )

Struktur mobilisasi merupakan salah satu bentuk ekspresi dalam menyampaikan suatu tujuan analisis dalam keadaan sosial politik yang berpengaruh terhadap terciptanya suatu struktur, sikap serta keberhasilan dalam gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat.

## 3. Pembingkai aksi (*framing* )

Pembingkai aksi adalah bentuk seni dalam menciptakan suatu komunikasi sosial dan bentuk penyampaian pesan yang memiliki tujuan untuk menggerakkan individu atau kelompok sosial dan mampu menarik keterlibatan partisipasi masyarakat.

### **1.6.3 Kemiskinan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI), miskin memiliki arti tidak berharta dan selalu serba kekurangan ( berpenghasilan rendah ), kemiskinan berarti suatu hal yang rendah dan berada dalam keadaan kekurangan dan tidak memiliki daya untuk memenuhi kebutuhan. Adapun defenisi kemiskinan sebagai berikut :

#### a) Defenisi Kemiskinan

Chamber dalam (Ningrum et al., 2020) mendefenisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan seseorang berada dalam posisi serba kekurangan mulai dari kekurangan uang dan barang dalam memenuhi kebutuhan untuk hidup serta merasa kesusahan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang menempatkan posisi seseorang berada pada keadaan kelaparan. Kemiskinan tidak hanya tentang keadaan seseorang yang berada dalam posisi kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan kemiskinan merupakan suatu hal yang terjadi oleh adanya sebab dan

akibat. (Husniyah et al., 2022) Berpendapat bahwa kemiskinan terjadi terhadap seseorang ataupun individu dengan adanya sebab tidak tercapainya suatu tujuan hidup karena disebabkan terjadinya pengangguran ataupun tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Tidak mampunya seseorang memenuhi kebutuhan standar disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk memperoleh pekerjaan serta ketidakmampuan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam menunjang kebutuhan hidup yang juga bernilai sebagai salah satu bentuk kemiskinan (Faizin, 2021).

#### b) Jenis – Jenis Kemiskinan

Menurut Chambers (S Gopal et al., 2021) kemiskinan dapat dibedakan dengan berbagai jenis dan jumlah pendapatan setiap individu dan pendapatan sering menjadi salah satu bagian untuk mengukur kemiskinan seseorang, adapun jenis – jenis kemiskinan adalah sebagai berikut :

##### 1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut terjadi apabila pendapatan seseorang berada dibawah garis kemiskinan dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup serta kebutuhan dalam memenuhi pangan, sandang, papan dan juga keberadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi hak untuk memperoleh pendidikan yang diperlukan guna mendapatkan suatu pekerjaan yang layak.



## 2) Kemiskinan Relative

Kemiskinan relative adalah salah satu bentuk kemiskinan yang terjadi jika seseorang berada pada posisi dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang tidak dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, sehingga pendapatan seseorang mengalami ketimpangan atau sebuah posisi keberadaan seseorang pada garis kemiskinan namun belum berada dibawah kemampuan masyarakat sekitar.

## 3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang mengacu pada sikap persoalan seseorang individu atau sekelompok orang dalam tatanan masyarakat yang dipengaruhi oleh suatu faktor kebudayaan seperti keberadaan seseorang yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, adanya rasa malas serta boros dan tidak memiliki daya kreatifitas meskipun seseorang tersebut mendapatkan bantuan dari orang atau pihak lain.

## 4) Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural merupakan situasi yang disebabkan rendahnya suatu akses terhadap sumberdaya yang terjadi dalam sistem tatanan sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh sistem budaya, sosial politik yang tidak memberikan dukungan untuk pembebasan terhadap kemiskinan, tetapi sering menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan struktural dapat terjadi ketika lembaga – lembaga dalam masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai berbagai sarana ekonomi serta berbagai fasilitas sehingga masyarakat tetap dibiarkan berada pada posisi miskin(Alawiyah et al., n.d.,2021).

#### **1.6.4 Pemerintah Kelurahan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan dan tugas pokok kecamatan dan kelurahan dalam pasal 1 disebutkan bahwa kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja di Kecamatan yang dipimpin oleh seroang lurah yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat. Adapun defenisi kelurahan sebagai berikut :

##### a) Defenisi Kelurahan

Pemerintah kelurahan merupakan pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kelurahan. Berdasarkan peraturan pemerintah pasal 25 Nomor 17 tahun 2018 dijelaskan bahwa kelurahan dipimpin oleh seroang lurah dan dibantu oleh beberapa perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas – tugas pemerintahan di kelurahan.

Seorang lurah dalam memimpin di kelurahan memiliki beberapa tugas, diantaranya :

- a. Melaksanakan kegiatan ditingkat kelurahan, seorang lurah memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dijalankan ditingkat kelurahan.
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, lurah memiliki tugas memberikan fasilitas kepada masyarakat dengan menerima aspirasi masyarakat dalam kelurahan, hal ini bertujuan untuk terlaksananya pemberdayaan terhadap masyarakat dikelurahan.

- c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, lurah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ditingkat kelurahan dengan memberikan bentuk pelayanan kenyamanan, ketentraman dan menentukan ketertiban dapat berjalan dalam masyarakat kelurahan.
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum, lurah memiliki kewajiban menjamin terpeliharanya segala jenis sarana dan prasarana serta berbagai macam fasilitas pelayanan yang terdapat di sebuah kelurahan.

Pemerintahan kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan atau wilayah ibukota dan kecamatan, dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau pemerintahan yang bersandingan dengan pemekaran satu kelurahan atau dua bahkan lebih. Pembentukan pemerintah kelurahan didasarkan dengan beberapa syarat, diantaranya adanya jumlah penduduk, luas wilayah bagian kerja serta terdapat sarana dan prasarana pemerintahan.

### **1.7 Defenisi Konseptual**

Fokus penelitian ini adalah Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memperkuat Gerakan “WARSIMAH” Sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Gunung Ketur, Kota Yogyakarta. Hal ini mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang berkewajiban memberikan pelayanan terhadap setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar serta mengacu terhadap peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang tugas pokok kelurahan yang memiliki kewajiban melaksanakan urusan pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas memimpin kelurahan.

### **1.7.1 Peran**

Peran merupakan sebuah perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang individu atau kelompok dan dapat mempengaruhi suatu usaha atau pekerjaan dalam sebuah organisasi yang memiliki kedudukan didalam masyarakat.

### **1.7.2 Gerkan sosial**

Gerakan sosial merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara kolektif dan terorganisir dengan tujuan untuk dapat mengubah atau mempertahankan unsur tertentu dalam masyarakat.

### **1.7.3 Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi seseorang individu atau kelompok mengalami kesulitan serta kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan pangan dan sandang serta suatu keadaan yang tidak dapat mengusahakan kebutuhan tempat tinggal.

### **1.7.4 Pemerintah Kelurahan**

Pemerintah Kelurahan merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang lurah dalam menjalankan urusan pemerintahan, melaksanakan pemberdayaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat ditingkat kelurahan.

## **1.8. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional merupakan batasan serta cara untuk mengukur variabel yang akan teliti oleh peneliti. Defenisi operasional digunakan sebagai pengukuran variable yang menjadi inti dari sebuah penelitian, disusun dengan menggunakan matrik yang berisi tujuan, nama variabel serta indikator variabel. Menurut

(Amaliyah et al., 2015a) defenisi operasional disusun untuk memudahkan dan menjaga konsistensi dalam pengumpulan data serta untuk menghindari perbedaan interpretasi dan membatasi dalam ruang lingkup variabel.

**Tabel 1.2 Defenisi Operasional**

<b>Tujuan</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>
Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Memperkuat Gerakan “WARSIMAH” Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Gunungketur Kota Yogyakarta	Peran	Peran Sebagai Motivator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan motivasi</li> <li>- Sikap Kepercayaan</li> <li>- Bentuk kerjasama</li> </ul>
		Peran Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan Fasilitas terhadap masyarakat</li> <li>- Perantara masyarakat dengan pemerintah</li> <li>- Penganggaran program kegiatan</li> </ul>
		Peran Mobilisator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggerakkan masyarakat</li> <li>- Mendorong aktifitas gerakan “WARSIMAH”</li> <li>- Penyediaan kebutuhan masyarakat</li> </ul>
		Peran perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi masyarakat dalam prencanaan</li> </ul>

			- Melibatkan masyarakat dalam program pembangunan
--	--	--	---

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data. Teknik Analisis data menurut (Amaliyah et al., 2015) merupakan teknik yang dilaksanakan dengan pengaturan secara sistematis menggunakan bahan wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dan kegiatan observasi dalam menafsirkan data yang diperoleh. Analisa data merupakan pengolahan yang dilaksanakan dari data – data yang didapatkan oleh peneliti baik dari sumber primer maupun sumber sekunder. Analisis data sebagai salah satu upaya mengolah data secara sistematis sehingga dapat dipahami secara jelas. Dari analisis ini kemudian diperoleh penemuan kesimpulan terhadap objek penelitian sehingga hasil temuan dapat bermanfaat dalam penguatan data penelitian yang sedang dijalani.

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Gunung Ketur yang berada di wilayah Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta. Dikarenakan penelitian ini meneliti tentang Peran Pemerintahan Kelurahan Gunungketur Dalam Memperkuat Gerakan “WARSIMAH” Sebagai upaya pengentasan kemiskinan pasca pandemi Covid-19. Kelurahan Gunungketur terletak di jl. Jayaningparan No.10 Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **1.9.3 Jenis Data**

#### **a) Data Primer**

Data primer atau data utama merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui kegiatan observasi dan kegiatan wawancara, kemudian hasil temuan diolah oleh peneliti dalam bentuk deskripsi kata. Sumber data dari penelitian yang dilaksanakan didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang ditujukan pada sampel terpilih yang sudah ditentukan oleh peneliti.

#### **b) Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder didapatkan dari data penelitian sebelumnya atau sebuah laporan yang tersusun dalam bentuk arsip yang biasa disebut dengan data dokumenter. Data sekunder akan digunakan untuk memperjelas masalah penelitian yang sedang diteliti, dikumpulkan dari berbagai literature seperti jurnal tentang peran pemerintahan kelurahan dalam mengembangkan potensi kelurahan di berbagai kelurahan, dokumentasi berupa ( Visi dan Misi Pemerintah Kelurahan Gunungketur ) dan website [gunungketurkel.co.id](http://gunungketurkel.co.id).

### **1.9.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan kegiatan percakapan yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang terdiri dari informan dan narasumber yang memberikan penjelasan terkait data yang ditanyakan, wawancara dilaksanakan baik secara langsung ataupun tidak langsung dimana salah satu pihak bertujuan untuk mencari tahu tentang informasi yang dibutuhkan dan dari lawan bicara sebagai narasumber yang menyampaikan informasi.

Menurut Sugiyono ( 2106:317 ) Wawancara dilaksanakan untuk mengetahui beberapa hal untuk menemukan permasalahan dan hal – hal yang ingin dibutuhkan

secara mendalam. Keuntungan wawancara antara lain :

1. Jawaban dari seorang informan lebih tepat dikarenakan seorang informan memiliki kesempatan bertanya dan seorang pencari informasi dapat memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh pencari informasi.
2. Wawancara dilaksanakan guna menghindari terjadinya kesalahpahaman antara informan dan pencari data perihal informasi yang ingin diketahui sehingga dapat menginterpretasikan informasi secara jelas dan tepat.
3. Pencari informasi dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kondisi wawancara yang sedang terjadi secara fleksibel. Seperti peneliti akan mendapatkan hal – hal khusus yang sering luput dari beberapa hal yang ingin ditanyakan oleh pencari informasi.

**Tabel 1.4 Sumber Wawancara**

<b>Nama</b>	<b>Instansi/Jabatan</b>
Sunarni, S.M.MM	Lurah Kelurahan Gunungketur
Sri Handayani	Kepala seksi pemberdayaan masyarakat kelurahan gunungketur
Mukidah Suharini	Kepala seksi perekonomian dan pembangunan kelurahan Gunungketur
Nyoman Anjas	Ketua Komunitas Warung Omah Kreatif Loedji.
Rudi Nurseto	Warga Kelurahan Gunungketur

#### **b. Dokumentasi**

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang dapat memperkuat hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian ini dokumentasi berbentuk sebuah data atau laporan yang berkaitan dengan kegiatan masarakat dan kelurahan Gunungketur dalam mengatasi persoalan kemiskinan



masyarakat.

### **1.9.5 Teknik Analisis Data**

#### **1. Pengumpulan Data ( *Data Collection* )**

Menurut (Apriliawati, 2020) Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti merupakan sebuah teknik yang dilaksanakan untuk keperluan penelitian, peneliti terfokus kepada identifikasi masalah terhadap pertanyaan – pertanyaan yang menjadi penelitian sehingga dirumuskan pada fokus penelitian. Setiap rumusan pertanyaan membutuhkan teknik pengumpulan data yang berbeda, teknik yang dapat dilaksanakan bisa berupa wawancara, teknik observasi dan dokumentasi.

#### **2. Reduksi data ( *Data Reduction* )**

Reduksi data menurut (Ritonga & Muhandhis, n.d. 2020 ) adalah proses menyeleksi data untuk mendapatkan data yang lebih baik dan terperinci dengan menggunakan dimensi yang jauh lebih kecil. Mereduksi data juga merupakan proses penyederhanaan data dan transformasi dari data yang kasar muncul dari catatan – catatan peneliti lapangan. Mereduksi data meliputi kegiatan meringkas, menelusuri, ringkasan atau uraian yang singkat. Berdasarkan teori diatas, dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses seleksi guna memilih data mana yang akan peneliti gunakan ataupun data yang relevan terhadap penelitian yang dilaksanakan.

#### **3. Mengolah Data.**

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan pengolahan data setelah dilaksanakan pemilihan data dengan baik, pengolahan ini dilaksanakan oleh peneliti untuk mengolah data yang sudah direduksi. Data – Data yang sudah diolah peneliti digunakan untuk penyajian data dalam penelitian.

#### 4. Penyajian Data ( Data Display )

Penyajian data menurut (Apriliawati, 2020) merupakan aktifitas yang dilakukan oleh peneliti dalam menyusun informasi yang didapatkan sehingga informasi yang diperoleh memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks yang berbentuk naratif dalam bentuk catatan, matriks dan grafik. Penggabungan informasi dari penyajian data yang diperoleh memudahkan peneliti untuk melihat hasil penelitian yang dilaksanakan, menemukan fenomena yang sedang terjadi apakah sudah tepat atau belum atau penelitian harus menganalisis ulang. Dalam tahapan ini peneliti akan menyajikan data dengan bermacam-macam bentuk, seperti penyajian gambar, grafik, bagan ilustrasi dan tabel.

#### 5. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut (Apriliawati, 2020) adalah sebagai salah satu bentuk kegiatan dari hasil analisis yang dilakukan dan interpretasi data yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan judul penelitian, teori yang relevan dalam penelitian, serta temuan dari hasil analisis data dalam penelitian yang dilakukan.